



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOHN ROBERTHO
2. Jabatan : DIREKTUR KESELAMATAN DAN KEAMANAN
3. NHK : 98114

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.970.000.000

1. Tanah Seluas 121 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. Tanah Seluas 384 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/67 m2 di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/116 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 554.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. MOBIL, NISSAN LIVINA VE 1.5 (4X2) A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 57.500.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.353.101.287**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 5.934.601.287



III. HUTANG

Rp.

1.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.933.601.287

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.